

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan SK Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia, berbeda antar satu PTM dengan PTM lain. Pertama, ada PTM yang masih bertahan dengan Pendidikan Kewiraan. Kurikulum ini merupakan produk SK No. 32/DJ/Kep/1983 yang telah mengalami penyempurnaan sebanyak tiga kali. Alasan yang dikemukakan adalah karena merasa belum tahu dengan SK terbaru dari Dirjen Dikti tersebut. Kedua, ada PTM yang sudah tahu perubahan tersebut akan tetapi belum mampu melaksanakannya, latarbelakang ketidakmampuan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia yang telah memenuhi syarat untuk menggajar mata kuliah tersebut. Ketiga, adalah PTM yang sudah tahu dan sudah melaksanakan PKN.

Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sudah melaksanakan PKN, faktor penyebabnya antara lain: pertama, adanya inisiatif dosen yang selama ini mengampu mata kuliah Pendidikan Kewiraan, dan kedua adalah atas inisiatif pimpinan PTM. Bentuk realisasi PKN sendiri ada dua; pertama, nama mata kuliahnya masih Pendidikan Kewiraan, akan tetapi isinya sudah PKN sebagaimana SK No. 267. Bentuk ke dua adalah antara nama dan isi sudah sesuai, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagian besar *stakeholders* PTM tidak puas dengan materi dan metode pengajaran PKN. Materi PKN masih dianggap mewarisi materi Pendidikan Kewiraan yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Metode pengajarannya juga belum berkembang dari metode ceramah yang condong ke arah indoktrinasi. Hal lain yang dianggap mengganggu pelaksanaan Pendidikan

Kewiraan dan PKN adalah citranya yang negatif di hadapan mahasiswa. Citra itu muncul karena materinya yang masih merupakan warisan rezim masa lalu, dosennya bukan dianggap dosen yang reformis, metodenya adialogis, dan proses pengajaran dilakukan dengan kelas yang jumlah mahasiswanya sangat besar.

Menurut *stakeholders* PTM, CE berpeluang baik untuk dapat dikembangkan di PTM, alasannya adalah perubahan situasi sosial politik di Indonesia, di mana iklim reformasi diharapkan juga mampu merubah mata kuliah yang dianggap warisan masa lalu. Perubahan ini diharapkan dijadikan peluang untuk mendidik mahasiswa sebagai warga negara yang baik, tanpa harus dikonotasikan dengan bela negara. Alasan berikutnya adalah keinginan untuk menggabungkan dua mata kuliah yang dinilai "tidak terlalu bermanfaat" yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Peluang lain adalah terbukanya pintu untuk memasukkan nilai-nilai lokal dalam CE, nilai lokal itu dapat berupa nilai komunitas, nilai persyarikatan Muhammadiyah, atau nilai yang menyangkut program studi tertentu.

Jalur lain pengembangan CE di luar jalur pengajaran banyak diapresiasi oleh *stakeholders* PTM. Jalur tersebut adalah melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat dan melalui kegiatan kemahasiswaan. Melalui kegiatan pengabdian diyakini memiliki efek perluasan gagasan CE yang lebih luas, yaitu kepada masyarakat umum. Problem yang dirasa perlu diantisipasi adalah materi dan metode pengembangannya. Pengembangan melalui kegiatan kemahasiswaan dinilai baik dalam konteks pengembangan nilai demokrasi kehidupan kemahasiswaan.

Problem penilaian keberhasilan CE, merupakan masalah yang banyak dikeluhkan. CE yang cenderung ke pendidikan nilai membutuhkan instrumen penilaian keberhasilan yang lebih kompleks. Ranah pengajarannya yang melampaui domain kognitif, dan bergerak ke arah afektif dan psikomotorik

memerlukan alat evaluasi yang lebih rumit. Dibutuhkan kajian yang mendalam untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar CE.

B. Rekomendasi

1. Sosialisasi pengembangan CE diharapkan dapat dilakukan lebih awal. Sebagai matakuliah baru dan atau kebijakan baru maka pimpinan PTM membutuhkan waktu untuk mensosialisasikan di lingkungan perguruan tinggi yang dipimpinnya, karena implikasi kuliah baru tentu bersinggungan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya lain sehingga pimpinan perlu waktu yang tidak singkat untuk menghitung berbagai implikasi tersebut. Sosialisasi dapat memanfaatkan pertemuan-pertemuan PTM, maupun menggunakan media komunikasi lain..
2. Workshop pada beberapa level kebijakan diperlukan, yaitu level pimpinan, level koordinator MKDU atau MKPK, level lembaga pengabdian, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Workshop ini diperlukan untuk memperjelas konsep *civic education* yang hendak dikembangkan, materinya, mekanisme pengembangan, metode pengajaran, serta evaluasi programnya. Disamping itu workshop juga akan mempercepat proses sosialisasi, terutama dengan akan dilakukannya pengembangan CE melalui pemanfaatan jalur lain di luar jalur pengajaran.
3. Pemahaman sebagian *stakeholders*, bahwa CE adalah pendidikan nilai, membutuhkan pengertian dan kesadaran dari para pengajar, sebab ranah yang diajarkan berbeda dengan mata kuliah lainnya. CE melibatkan aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik secara bersamaan. Konsekuensi lain adalah perlunya perubahan cara pengajaran dari *transfer of knowledge* ke *transfer of values*. CE juga

menuntut aspek keteladanan atas nilai-nilai yang dikuliahkan oleh para dosen. Evaluasi hasil pendidikan nilai juga berbeda dengan pendidikan yang fokusnya pada aspek kognitif.

4. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diwawancarai berkeberatan apabila ada banyak penambahan mata kuliah “yang tidak menunjang program studi”. Dengan demikian diharapkan CE tidak menambah mata kuliah baru, akan tetapi dapat menjadi pengganti atau menjadi alternatif dari penggabungan Pendidikan Pancasila dan PKN.
5. *Civic education* perlu diajarkan dalam kelas dengan jumlah mahasiswa tidak terlalu banyak. Sebagaimana mata kuliah lain, apalagi CE sebagai pendidikan nilai membutuhkan kelas yang efektif serta interaksi antar masing-masing unsur yang intensif. Dengan pola kelas kecil seperti itu program pendidikan kewargaan dapat berjalan secara baik..
6. Perlu forum komunikasi dan koordinasi bagi pengajar CE. Sebagai mata kuliah dan dosen baru untuk CE, maka komunikasi antara pengajar akan sangat membantu mempercepat kematangan konseptual sebuah mata kuliah. Model evaluasi yang rumit juga dapat diselesaikan jika sering sharing pengalaman antara dosen satu dengan yang lain.